

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk menetapkan *perbandingan kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan. (Studi Kasus : Perbatasan antara Kalimantan Barat-Sarawak)* menjadi judul skripsi. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berbatasan darat langsung di pulau Kalimantan dan kedua negara juga sama-sama memiliki kultur sosial dan budaya yang sama. Hal itu tidak mengherankan karena baik Indonesia dan Malaysia adalah negara yang berasal dari satu rumpun yang sama. Namun demikian, walaupun memiliki status sebagai negara yang bertetangga dan berasal dari satu rumpun, namun baik Indonesia dan Malaysia tidak jarang terlibat dalam berbagai sengketa perbatasan.

Selain itu, di wilayah perbatasan darat kedua negara di Kalimantan tepatnya perbatasan yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Sarawak memiliki problematika yang unik dimana walaupun memiliki struktur sosial dan budaya yang sama, terdapat perbedaan status ekonomi dan tingkat kesejahteraan antara warga negara di wilayah teritorial Indonesia dengan yang ada di wilayah teritorial Malaysia.

Dan yang terpenting, tema ini sangat menarik untuk diangkat sebab bagaimana penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh perbedaan kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia terhadap wilayah perbatasan di pulau Kalimantan.

B. Latar Belakang Masalah

Perbatasan sebuah negara dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-17 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara. Dalam kaitan ini menarik untuk mencermati kelahiran negara-bangsa sebagai bentuk negara modern yang berkembang sejalan dengan merebaknya identitas nasional.¹

Wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat terjadi antara lain karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi

¹ Husnadi. (2006). *Menuju Model Pengembangan Wilayah Perbatasan antar Negara*. Semarang:Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro. Hal 16.

masyarakat di sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.²

Sejatinya pada perkembangan modern seperti saat ini, kawasan perbatasan antar negara memiliki potensi strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kawasan ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda multiplier effects.³

Berkaitan dengan wilayah perbatasan sendiri, sesuai dengan letak geografisnya Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang wilayahnya berbatasan langsung baik darat maupun laut. Perbatasan darat kedua negara terletak di pulau Kalimantan sedangkan perbatasan laut terletak di Selat Malaka yang menghubungkan pulau Sumatera yang merupakan wilayah teritorial Indonesia dengan Malaysia Barat.

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sendiri muncul berdasarkan Traktat London pada tahun 1824 dimana terjadi kesepakatan bersama antara

² Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2005). *Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara*. Jakarta:Pusat Kajian Administrasi Internasional. Hal.03.

³ DPD RI bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura. (2009). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi* . Pontianak. Hal I-2.

Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda dan Malaysia sendiri merupakan wilayah jajahan Inggris. Salah satu isi perjanjian itu adalah batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershed. Watershead sendiri artinya yaitu pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah.⁴

Berdasarkan peta administratif sendiri, dua Propinsi di wilayah teritorial Indonesia, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan dengan dua Negara bagian di wilayah teritorial Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Perbatasan Indonesia dengan Malaysia membentang sepanjang ± 1.840 km (mencakup batas Propinsi Kalimantan Timur dan Sabah ± 1.035 km dan Kalimantan Barat dan Sarawak ± 805 km).⁵ Dengan garis panjang perbatasan sedemikian rupa, menyimpan potensi permasalahan yang luar biasa dan yang paling nyata yaitu permasalahan yang berdimensi regional antarnegara, yaitu lebarnya kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk negeri yang satu dengan negeri tetangga, pergeseran atau hilangnya patok tapal batas negara sehingga menimbulkan konflik mengenai garis batas dan kasus-kasus lainnya.

⁴ Pontianak Post Online: "*Cornelis : Lebih Baik Perang*". (04 Oktober 2011).. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2011. Situs: <http://pontianakpost.com>

⁵ Op.Cit. Hal 04.

Khusus perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri sejauh ini telah menetapkan dua Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi dan tiga Kabupaten lagi masih berstatus Pos Lintas Batas (PLB) biasa.⁶

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan Custom (bea cukai), Imigration (keimigrasian), Quarantine (karantina) dan Security (keamanan) bagi penduduk di wilayah Republik Indonesia atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang disepakati dengan menggunakan Paspor resmi.⁷

Sedangkan Pos Lintas Batas (PLB) tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas yang hanya digunakan oleh penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang disepakati dengan menggunakan Paspor Lintas Batas.⁸

Tabel 1.1

Jalur Perlintasan Resmi Kalimantan Barat-Sarawak

<i>No.</i>	<i>Kalimantan Barat</i>	<i>Sarawak</i>	<i>Status</i>
1	Entikong (Kabupaten Sanggau)	Tebedu (Distrik Samarahan)	PPLB

⁶ Pemahaman Penulis.

⁷ *Daftar Istilah Wilayah Perbatasan*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2011. Situs: <http://dilemmanusantara.com>,

⁸ Ibid.

2	Aruk, Sajingan Besar (Kabupaten Sambas)	Biawak (Distrik Kuching)	PPLB
3	Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang)	Serikin (Distrik Kuching)	PLB
4	Jasa, Ketungau Hulu (Kabupaten Sintang)	Sri Aman (Distrik Sri Aman)	PLB
5	Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu)	Lubok Antu (Distrik Sri Aman)	PLB

Sumber: Pemantauan Lapangan dan Pemahaman Penulis.

Selain perlintasan resmi, terdapat pula pos lintas batas yang masih berupa jalan setapak. Sebagaimana telah diidentifikasi oleh kedua pemerintah (Kalbar dan Sarawak) bahwa dari sekitar 800 km panjang perbatasan Kalbar-Sarawak, terdapat lebih kurang 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak yang sekaligus merupakan pintu atau tempat keluar masuk orang dan barang dari dan ke Sarawak/Kalbar. Sementara itu yang disepakati kedua negara sebagai pos keluar masuk sesuai persetujuan lintas batas tahun 1984 adalah 10 buah desa di Kalbar dan 7 buah kampung di Sarawak.⁹

Pada kondisi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat-Sarawak memiliki kultur sosial dan budaya yang sama dalam masyarakatnya. Apalagi kebanyakan dari mereka terdiri dari suku-suku yang

⁹ DPD RI bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura. (2009). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi*. Pontianak. Hal I-3.

masih serumpun dan bersaudara dengan masyarakat di negara tetangga. Batas wilayah negara itulah yang memisahkan kewarganegaraan mereka. Baik di wilayah Kalimantan Barat maupun Sarawak didiami oleh dua etnis dominan, yaitu etnis Melayu dan Dayak. Namun walaupun memiliki kultur sosial dan budaya yang sama, terjadi kondisi yang berbeda dalam aspek kesejahteraan ekonomi antara masyarakat yang berada di wilayah teritorial Indonesia dengan yang berada di wilayah teritorial Malaysia.

Masyarakat perbatasan di wilayah Sarawak lebih merasakan pembangunan dibanding masyarakat perbatasan yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Hal itu kemudian menyebabkan banyak masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat terutama yang daerahnya minim tersentuh oleh pembangunan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada wilayah Malaysia terutama jika menyangkut pada hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi seperti mata pencaharian ataupun kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara sendiri diperlukan dua pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu kebijakan berbasis pendekatan keamanan dan kebijakan berbasis pendekatan kesejahteraan. Sejatinya pada era modern seperti saat ini, kebijakan berbasis pendekatan kesejahteraan harus lebih dominan dibanding kebijakan berbasis pendekatan keamanan. Kebijakan berbasis pendekatan kesejahteraan diperlukan dalam upaya memanfaatkan potensi strategis wilayah perbatasan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Di sinilah keunggulan kebijakan dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia lebih berhasil menjalankan kebijakan berbasis pendekatan kesejahteraan dengan lebih baik dibanding yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

C. Pokok Permasalahan :

Dari latar belakang permasalahan, maka yang akan menjadi pokok kajian pada penulisan ini, yaitu : **bagaimana kebijakan berbasis pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia terhadap pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara di Kalimantan, tepatnya perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak.**

D. Kerangka Teoritik :

1. Konsep Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan serasi dengan pendekatan lainnya, yaitu pada bidang keamanan.

Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas Ekonomi dan Perdagangan, diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya. Pendekatan kesejahteraan secara spasial direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan

perbatasan yang akan difungsikan sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara.¹⁰

Pendekatan Keamanan (Security Approach) memandang kawasan yang rawan akan pergolakan berkaitan dengan letaknya yang bersebelahan langsung dengan negara lain. Oleh karena itu wilayah perbatasan memiliki peranan vital bagi tetap tegaknya kedaulatan suatu negara. Usaha mengamankan dan melindungi berarti mewujudkan kondisi keamanan nasional yang terkendali. Dengan demikian pendekatan keamanan melihat kawasan perbatasan memiliki peranan penting bagi tetap stabilnya keutuhan wilayah suatu negara secara keseluruhan.¹¹

Baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia telah menerapkan konsep pengelolaan wilayah perbatasan antar negara dalam kebijakan pembangunan wilayah perbatasannya di Kalimantan. Hanya saja terjadi perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Pemerintah Malaysia berhasil menjalankan pengelolaan wilayah perbatasan dengan lebih berhasil dan merata serta berlangsung dengan efektif sedangkan di sisi lain, pemerintah Indonesia masih belum berhasil menjalankan pengelolaan wilayah secara efektif.

¹⁰ Husnadi. (2006). *Menuju Model Pengembangan Wilayah Perbatasan antar Negara*. Semarang:Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro. Hal 26.

¹¹ Ibid. Hal 28.

2. Konsep Safety Belt

Konsep Safety Belt atau sering juga disebut dengan konsepsi Sabuk Pengaman Perbatasan. Konsep Safety Belt dimaksudkan untuk mendesain konsep pembangunan yang mencakup pembangunan/pengelolaan wilayah perbatasan antar negara secara sinergis dan terintegrasi dengan tujuan mampu menyelaraskan antara pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Fungsi ganda ini perlu diberikan mengingat pertahanan adalah penting bagi tegaknya negara disamping masyarakat perbatasan sendiri memerlukan peningkatan kualitas hidup.¹²

Untuk penyusunan konsep safety belt diperlukan konsep yang mempunyai tujuan utama, yaitu :

- Mewujudkan keseimbangan di wilayah perbatasan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan dan perputaran roda perekonomian di wilayah perbatasan antar negara yang berimbang. Hal ini mendorong terwujudnya kawasan perbatasan antar negara yang dapat membuka kesempatan lebih besar bagi tiap-tiap daerah di wilayah perbatasan untuk tumbuh dan berkembang lebih maju yang dilakukan secara efisien dan saling menguntungkan.¹³

¹² *Membangun Wilayah Perbatasan*. (20 Mei 2008). Diakses pada tanggal 09 Oktober 2011. Situs : <http://wilayah-perbatasan.com>.

¹³ *Ibid*.

- Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat ketahanan nasional.¹⁴

Efektivitas kerja dalam mengelola safety belt di wilayah perbatasan diperlukan mengingat kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat perbatasan dan lingkungannya selalu terjadi. Akses informasi mengenai perbatasan dan lingkungannya mutlak diperlukan oleh para pengelola perbatasan. Melalui akses ini para pembuat keputusan di pusat dan daerah dapat segera mengambil kebijakan dan keputusan untuk penanggulangan kejadian di wilayah perbatasan secara real time.

E. Hipotesis :

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka teori yang diterapkan, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

Di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, kebijakan berbasis pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia lebih berhasil dan berjalan dengan optimal dibanding yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa fakta yang mendasarinya antara lain:

- Bidang penyediaan energi listrik. Di kawasan perbatasan Kalimantan Barat daerah-daerah yang sudah hampir 100% teraliri oleh listrik hanya

¹⁴ Ibid.

beroperasi sekitar 12 jam saja. Sedangkan pada saat bersamaan di kawasan perbatasan Serawak telah tersedia pembangkit listrik tenaga air, seperti dari bendungan Batang Ai di Lubuk Antu dan bendungan Bakun yang telah mampu melayani kebutuhan energi listrik seluruh masyarakat di kawasan perbatasan Malaysia.

- Bidang penyediaan air bersih. Ketika penyediaan air bersih di sebagian besar desa-desa di kawasan perbatasan di Kalimantan Barat hanya mengandalkan swadaya masyarakat maupun individu, di kawasan perbatasan Sarawak setiap desa telah dilengkapi sistem distribusi air jaringan pipa sampai ke rumah-rumah yang sumbernya mengandalkan hulu sungai-sungai terdekat di sekitar Desa.
- Bidang telekomunikasi. Di kawasan perbatasan Kalimantan Barat pelayanan Telekomunikasi yang sudah baik hanya sampai di Ibukota Kecamatan saja dimana telah terdapat jaringan telpon milik PT Telkom dan beberapa perusahaan seluler Indonesia, sedangkan di wilayah desa-desa hanya mengandalkan penggunaan radio SSB yang dioperasikan oleh individu-individu.
- Bidang infrastruktur jalan raya darat. Kondisi jaringan jalan darat di sebagian besar kawasan perbatasan Kalimantan Barat pada saat ini jika ditinjau dari segi kualitas jalan maka hanya sedikit jaringan jalan yang layak, sementara yang lainnya dalam kondisi rusak parah dan ada beberapa yang belum tersentuh pembangunan jalan aspal. Sementara di kawasan

perbatasan Sarawak hampir semua telah terkoneksi oleh jaringan jalan darat yang baik.

F. Struktur Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab, dimana masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci pada sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan yang lainnya akan saling berhubungan sehingga nantinya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Alur skripsi ini akan diawali dengan :

Bab I, dimana akan membahas tentang pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritik, hipotesis, struktur penulisan, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, serta jangkauan penelitian.

Bab II, dimana pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum keadaan wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Pembahasan akan meliputi profil wilayah teritorial Indonesia maupun Malaysia, dalam hal ini profil Propinsi Kalimantan Barat maupun Negara Bagian Sarawak, serta profil kawasan perbatasan di wilayah Kalimantan Barat maupun di wilayah Sarawak yang meliputi administrasi, geografis, tingkat perekonomian, potensi Sumber Daya Alam, tingkat kesejahteraan, sarana dan prasarana serta infrastruktur.

Bab III, dimana pada bagian ini akan dibahas tentang kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia dalam penanganan wilayah perbatasan. Pembahasan meliputi kebijakan dari periode tahun 1991 sampai dengan sekarang.

Bab IV, dimana pada bagian ini akan dibahas tentang kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Malaysia dalam penanganan wilayah perbatasan. Pembahasan meliputi kebijakan dari periode tahun 1991 sampai dengan sekarang.

Bab V, dimana pada bab terakhir ini akan dibahas hal-hal berupa kesimpulan dari awal hingga akhir.

G. Tujuan Penulisan

Penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana perbedaan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia terhadap wilayah teritorialnya masing-masing yang merupakan wilayah perbatasan darat kedua negara di Kalimantan, tepatnya perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari aplikasi teori yang pernah penulis peroleh di bangku kuliah. Dan terakhir, tujuan penelitian adalah sebagai salah satu prasyarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan berdasarkan konsep atau teori yang digunakan, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah

atau jurnal-jurnal, surat kabar serta informasi-informasi yang diperoleh melalui media elektronik. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan konsep atau teori yang diterapkan.

I. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan periode tahun terhadap kebijakan yang telah diambil baik yang dilakukan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia terhadap wilayah perbatasan kedua negara di pulau Kalimantan, tepatnya perbatasan yang menghubungkan propinsi Kalimantan Barat yang merupakan wilayah teritorial Indonesia dengan negara bagian Sarawak yang merupakan wilayah teritorial Malaysia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Pembahasan meliputi kebijakan yang telah ditempuh kedua negara baik dari aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan Jadi dari tahun 1991-sekarang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam penelitian.